

**KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAHAN DALAM
PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI PETA JALAN REVITALISASI SMK**

Adji Widyaningrum
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
adjiwidya@gmail.com

ABSTRACT

Presidential Instruction Number 9 of 2016 concerning Vocational High School Revitalization in order to improve the competitiveness of Indonesian human resources has become a reference for the Ministry of Education, Culture, Research and Technology to implement vocational revitalization programs throughout Indonesia by considering regional potential, resources and real needs manpower to support economic development and regional development. The Presidential Instruction has been responded to by the East Java Provincial Government through Governor Regulation number 22 of 2017 concerning the acceleration of the revitalization of Vocational High Schools in East Java Province. This study aims to determine the organizational communication strategy of the East Java Provincial Government in compiling a Vocational High School Revitalization Roadmap that requires Regional Apparatus Cooperation, the Role and Participation of the Business and Industry World, suggestions and input from universities as well as harmonious Regency/City Government synergies.

keyword: public communication, government, and implementation

ABSTRAK

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia telah menjadi rujukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengimplementasikan program revitalisasi SMK di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan potensi wilayah, sumber daya, dan kebutuhan riil tenaga kerja untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Inpres tersebut telah direspon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan komunikasi publik yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Peta Jalan Revitalisasi SMK dalam menyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK.

Kata kunci: *komunikasi publik, pemerintah dan implementasi*

PENDAHULUAN

Di tengah-tengah arus revolusi Industri 4.0. Meskipun konsepnya masih belum tersebar luas, namun sangat berpotensi merubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Karakteristik model dari Industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru seperti sistem siber fisik, teknologi informasi dan komunikasi, jaringan komunikasi, big data dan cloud computing, pemodelan, virtualisasi, simulasi serta peralatan yang dikembangkan untuk kemudahan interaksi manusia dengan komputer.

Perkembangan teknologi telah mengubah perikehidupan manusia dalam segenap aspeknya. Sejak produksi massal barang dapat dilakukan manusia menggunakan mesin-mesin temuannya, dunia terus tumbuh dan berkembang dengan penemuan-penemuan baru. Teknologi menjadi sihir yang mengagumkan dengan inovasi yang tak terpikirkan sebelumnya. Menyadari dinamika zaman yang membutuhkan respon yang tepat maka SMK sebagai lembaga pendidikan telah diperkuat dan dikembangkan melalui Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2016, tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Terbitnya Instruksi Presiden, yang substansinya mengamanatkan revitalisasi dalam cakupan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan; menunjukkan pemerintah mendudukan penting dan strategisnya lembaga pendidikan vokasi untuk masa depan Indonesia.

Latar belakang diterbitkannya revitalisasi menunjukkan peran strategis SMK dalam perannya mendorong pembangunan Indonesia di masa depan. SMK sebagai institusi penyelenggara pendidikan kejuruan memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai lembaga pendidikan vokasi peran SMK juga membawa SMK menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja/industri. SMK dengan ciri keunggulan yang unik perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri yang semakin kompleks. SDM tingkat menengah dengan keterampilan spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja/ industri. Industri 4.0 juga memiliki tantangan yang harus dihadapi ke depan, seperti persoalan perubahan paradigma bisnis, keamanan, pengamanan, persoalan hukum dan IP, standarisasi dan tantangan perencanaan sumber daya manusia. Kesalahan yang terburuk dalam menghadapi perubahan ini adalah ketidakmauan untuk mengambil peran terhadap perubahan itu sendiri, sebab masa depan industri 4.0 masih belum terlihat jelas, kesuksesan dan kegagalannya sangat bergantung pada keterlibatan semua stakeholder. Hasil penelitian McKinsey Global Institute menunjukkan sekitar 30 persen tugas dari dua pertiga jenis pekerjaan akan dapat digantikan oleh teknologi seperti robot atau kecerdasan buatan. McKinsey memprediksi otomatisasi tersebut akan mengakibatkan hilangnya 3-14 persen profesi pada 2030. Sekitar 75 hingga 375 juta tenaga kerja di dunia harus berganti bidang mata pencaharian. Respon masyarakat dan dunia pendidikan pun bertransformasi ketika tantangan zaman berubah dengan cepat dari sebelumnya. Tumbuhnya blok ekonomi di berbagai belahan dunia akibat persaingan sudah tidak mengenal batas nasional suatu negara. (www.mckinsey.com, September 2019). Terbukanya masyarakat ekonomi di kawasan ASEAN dalam MEA yang telah diratifikasi menjadikan persaingan ketenagakerjaan menjadi global. Peluang dan tantangan abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pendekatan dalam mengatur

segenap elemen pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yg efektif. Banyak faktor yg mendorong pergeseran pendekatan pembelajaran di abad 21.

Pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi dan kompleksitas perikehidupan modern menjadikan ruang kelas perlu di revolusi menghadapi tantangan ini. Kualitas, waktu dan biaya menjadi segitiga keseimbangan, bagaimana pembelajaran dapat diatur dan berlangsung secara efektif. Tantangan bagi lembaga pendidikan dan prakteknya dengan motor penggerak guru untuk mewujudkan pendidikan yg efektif dg triangle rule : cost, time and quality.

Pembelajaran abad 21 membawa paradigma yang melandasi penyelenggaraan pendidikan yang fleksibel terhadap perubahan. Pendidikan bagi generasi milenial yang memiliki tantangan zaman berbeda dengan hadirnya dunia cyber, era gelombang industri keempat (Industry 4th). Training for the future Competence for the Company of Tomorrow and Future of Vocational Education.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan telah menjadi rujukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SMK untuk mengimplementasikan program revitalisasi SMK di seluruh Indonesia. Revitalisasi SMK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi wilayah, sumber daya, dan kebutuhan riil tenaga kerja untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Inpres tersebut telah direspon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur. Ruang Lingkup Peraturan Gubernur meliputi langkah-langkah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK, antara lain meliputi: (a) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; (b) menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; (c) melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; (d) mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing; (e) mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi; (f) mendorong dan memberi fasilitasi serta dukungan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK; dan (g) mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta masyarakat baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses penyerapan lulusan.

Regulasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Revitalisasi SMK melibatkan banyak stakeholder, Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Industri sebagai mitra SMK, Perguruan Tinggi sebagai penjaminan mutu dan tentunya seluruh SMK di Jawa Timur.

Komunikasi Publik Revitalisasi

Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi dan saluran komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan-pesan dari sumber ke suatu penerima, dengan mudah dapat dilihat bagaimana faktor-faktor komunikasi

terlibat secara vital dalam bentuk aspek proses keputusan yang secara keseluruhan membentuk perubahan sosial. Meski komunikasi tidak sinonim dengan perubahan sosial, namun komunikasi merupakan suatu elemen penting dalam proses perubahan sosial. Secara esensial, konsep perubahan sosial selain mencakup proses komunikasi, juga konsekuensi individual dan sosial sebagai hasil mengadopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi.

Revitalisasi membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, dengan berbagai terobosan-terobosan yang tepat dalam pelaksanaan revitalisasi itu sendiri. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program atau suatu kegiatan. Secara umum pengertian revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi sangat penting. Untuk menunjang revitalisasi yang transformatif diperlukan strategi komunikasi yang reliable agar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran (Jurnal agregasi vol VI/1, 2018 : 39).

Komunikasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

Komunikasi organisasi ini merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang memiliki tujuan untuk menjaga keharmonisan kerja sama diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal menyusun dan mengimplementasikan Peta Jalan Revitalisasi SMK Jawa Timur. Dinamika komunikasi organisasi di Pemerintah Jawa Timur menunjukkan adanya suatu aktivitas, tugas, pelayanan sebagai sarana berkoordinasi antar kolega membentuk kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung dalam upaya penyusunan dan pengimplementasian Peta Jalan Revitalisasi SMK Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki Strategi komunikasi organisasi yang efektif, transparan dan reliable sebagai dasar penyusunan kebijakan revitalisasi SMK di Jawa Timur, sebagai dasar dan pedoman bagi SMK di Jawa Timur untuk melaksanakan revitalisasi, meningkatkan partisipasi aktif semua stakeholder untuk berperan mewujudkan revitalisasi SMK di Jawa Timur, serta sebagai pedoman untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

John F. Thompson (1972:93) dalam (Thamrin 2017:5) salah satu pakar Pendidikan kejuruan, dalam bukunya yang berjudul *Foundations of Vocational Education* menyatakan bahwa Pendidikan kejuruan menggerakkan pasar kerja dan berkontribusi pada kekuatan ekonomi suatu negara. Peserta didik SMK dipersiapkan dengan dibekali berbagai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah didorong untuk meningkatkan jumlah SMK untuk mempersiapkan lulusan SMK menjadi tenaga terampil dan siap kerja.

Prosser dan Quigley dalam (Thamrin 2017:7) meyakini bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, peserta didik harus dibantu sekolah, sehingga seharusnya ada sekolah kejuruan untuk masyarakat sebagai pilihan dibandingkan sekolah umum yang sudah ada. Sekolah kejuruan yang dimaksud adalah sekolah yang menyediakan mata pelajaran untuk berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri (Alvita, 2019:42).

Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya ada dua paradigma kebijakan publik di negara-negara berkembang. Kebijakan publik pertama yaitu melihat kebijakan publik sebagai tugas pemerintah semata, sedangkan yang kedua melihat kebijakan publik sebagai suatu hal yang saling mempengaruhi antara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan Publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan dimana Tindakan pemerintah dilakukan untuk mencapai tujuan public. Dengan definisi kerja yang baik dari kebijakan publik yang bertujuan mengkaji keputusan pemerintah dalam Tindakan yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan publik disaring melalui proses kebijakan khusus, diadopsi, diimplementasikan melalui undang-undang, langkah-langkah pengaturan, tindakan pemerintah, dan ditegakkan oleh lembaga publik.

Berdasar paradigma kebijakan publik, dinyatakan bahwa proses lahirnya kebijakan dapat bersumber dari titik utama, yaitu pemerintah dan masyarakat. Hanya saja lahirnya kebijakan harus ada konteks pemicunya. Konteks tersebut sebagai rangkaian proses untuk meletakkan kebijakan publik pada Langkah-langkah kritis. Salah satu konteks kebijakan adalah keyakinan dan kepercayaan masyarakat karena diyakini masyarakat memiliki panduan-panduan kehidupan yang bersumber dari kepercayaan. (Vendi et al., 2024)

Dalam perspektif komunikasi, dimensi budaya merupakan bagian implisit dalam konteks sosio psikologikal proses komunikasi, sebagaimana disebutkan oleh DeVito bahwa proses komunikasi dapat terjadi dalam tiga konteks yaitu konteks fisik, sosio psikologikal, dan temporal atau waktu. Dalam pembuatan suatu kebijakan tidak lepas dari ketiga konteks tersebut karena suatu kebijakan lahir dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat. (DeVito, 1997).

Teori Komunikasi Kebijakan Publik (Teori Struktural Fungsional)

Teori dalam kajian ilmu sosial berfungsi sebagai panduan yang dapat membimbing pada masalah-masalah sosial. Bertolak dari kompleksitas isu kebijakan publik, maka dibutuhkan pendekatan multidisipliner. Teori kebijakan publik mengacu pada bagaimana memahami kebijakan publik itu sendiri dimana tidak hanya berkaitan dengan komunikasi tetapi juga bersinggungan dengan teori-teori sosial yang lebih luas. Teori struktural fungsional diilhami oleh pemikir klasik diantaranya adalah Socrates, Plato, Auguste Comte yang menilai bagaimana perspektif fungsionalisme dan menganalisis *social phenomena*. (Wirawan, 2012).

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan terhadap bagian lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. (Wirawan, 2012).

Teori struktural fungsional Talcott Parsons dimulai dengan empat imperative fungsional untuk semua sistem "Tindakan" dengan skema AGIL Yaitu *adaptation* (A) – adaptasi, *goal attainment* (G) – pencapaian tujuan, *integration* (I) – integrasi dan *latency* (L) – pemeliharaan pola.

Peta Jalan Revitalisasi SMK

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia telah menjadi rujukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembinaan SMK untuk mengimplementasikan program revitalisasi SMK di seluruh Indonesia. Revitalisasi SMK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi wilayah, sumber daya, dan kebutuhan riil tenaga kerja untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Revitalisasi SMK diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK sekaligus memberikan pengaruh terhadap kualitas lulusan SMK yang akan menjadi sumber daya pembangunan di Indonesia.

Inpres tersebut telah direspon oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur. Ruang Lingkup Peraturan Gubernur meliputi langkah-langkah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK meliputi:

- a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
- b) Menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c) Melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK;
- d) Mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
- e) Mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi LSP P1;
- f) Mendorong dan memberi fasilitasi serta dukungan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK; dan
- f) Mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta masyarakat baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses penyerapan lulusan.

Peraturan gubernur ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan peta jalan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Timur dan menjadi pedoman dalam melakukan upaya-upaya pengembangan bagi kemajuan pendidikan di Jawa Timur dalam rangka ikut berpartisipasi bagi peningkatan mutu pendidikan secara nasional. (<http://smk.kemdikbud.go.id/2019>).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif seperti yang dikutip dari Moleong, bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. (J.Lexs, 2006). Penelitian ini berbentuk paparan dan studi observasi yang bersifat mendalam, menggunakan *in depth interview* yaitu menggambarkan apa adanya atau memberi gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun dan mengimplementasikan Peta Jalan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Jawa Timur.

HASIL DATA

Paradigma revitalisasi pendidikan vokasi adalah berorientasi *demand driven*, dengan *pull strategy*. Tren dinamika kebutuhan pasar kerja (jumlah, lokasi, kecakapan dan waktu) untuk memenuhi industri yang dikembangkan harus menjadi daya tarik dan acuan dalam penyiapan tenaga kerja. Karena itu, penyusunan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi perlu diawali dengan Peta Jalan Industri yang berisi informasi tentang arah kebijakan pembangunan industri di Provinsi Jawa Timur. Dari Peta Jalan Industri kemudian bisa dibuat Peta Jalan Ketenagakerjaan yang berisi informasi tentang arah kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi. Berbasis informasi dari dua Peta inilah, Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di tingkat Provinsi Jawa Timur disusun. Dengan demikian ada link and match antara pembangunan industri, analisis kebutuhan tenaga kerja, serta penyiapan tenaga kerjanya oleh lembaga pendidikan vokasi. (Rusdyawan et al., 2024)

Karena bersifat multisektor, penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi. Anggota Tim Kerja berasal dari wakil-wakil Dinas terkait (Perindustrian, Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Dinas lainnya yang diperlukan), Kadin, Dunia Usaha/Industri, serta Perguruan Tinggi dengan arah kebijakan :

1. Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah
2. Arah Kebijakan Ketenagakerjaan
3. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan
4. Revitalisasi Kerjasama Dengan Dudi
5. Revitalisasi Sistem Sertifikasi
6. Revitalisasi Kurikulum
7. Revitalisasi Guru Dan Tenaga Kependidikan
8. Revitalisasi Sarana Dan Prasarana
9. Revitalisasi Tata Kelola Kelembagaan

Komunikasi Publik yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terkait Penyusunan dan Implementasi Peta Jalan Revitalisasi SMK

Melalui Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK di Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Forum Group Discussion dan Diskusi Terpumpun Revitalisasi SMK Tingkat Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu 2018 s.d 2020;

Diskusi ini melibatkan dinas/ instansi/ OPD, stakeholder dari Dunia Usaha dan Industri, Perguruan Tinggi sebagai penjamin mutu Pendidikan serta Lembaga SMK Se Jawa Timur dengan Tim Pokja Revitalisasi SMK dari Kemdikbud RI; Fokus pendidikan saat ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi unggul. Titik fokus di sini sebagai upaya memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Jawa Timur dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mulai menggeser arah pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik menjadi pembangunan sumber daya manusia. Secara nasional telah ditetapkan rencana target pencapaian kinerja tahun 2020-2024. Tahun 2019 telah dicapai 700 SMK (sekitar 32%) yang memiliki indeks mutu

baik. Tahun 2020-2024 ditargetkan ada 2.000 SMK di Jawa Timur dapat direvitalisasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi dan telah tercapai 70% SMK yang memiliki indeks mutu baik. Dari 2.154 SMK tersebut bidang industri manufaktur sebanyak 1188 SMK, bidang pertanian 229 SMK, bidang pariwisata 353 SMK, bidang ekonomi kreatif 26 SMK, bidang kemaritiman 81 SMK, serta bidang energi dan pertambangan 6 SMK. (Sumber : dapokemdikbud.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewujudkan revitalisasi SMK dengan berbagai program dan terobosan agar dapat membuka barrier yang ada. Apalagi secara keseluruhan pendidikan di SMK masih menghadapi problematika klasik yaitu ketersediaan tenaga pendidik, kompetensi dan profesionalisme guru, sarana dan prasarana, struktur kurikulum, serta komitmen dari dunia usaha dan industri. Selain itu, saat ini pendidikan SMK juga menghadapi tantangan yang tidak ringan yaitu permasalahan kesesuaian kompetensi yang dimiliki peserta didik dengan kebutuhan dan struktur pasar kerja.

Percepatan revitalisasi SMK harus menjadi komitmen Bersama. Diperlukan penentuan prioritas langkah percepatan revitalisasi SMK di Jawa Timur. Langkah tersebut adalah revitalisasi sumber daya manusia, memperkuat sistem administrasi sekolah, *link and match* dengan industri, kurikulum berbasis industri, teaching factory, penggunaan video tutorial, uji sertifikasi profesi, pemenuhan sarana dan prasarana, mengembangkan kearifan lokal.

Dengan percepatan revitalisasi diharapkan akan ada perubahan paradigma pendidikan. Perubahan ini akan dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK. Dari training and professional development menjadi capability development. Dari Expert-centered learning/job-based learning menjadi life-based learning/real world learning. Dari learner as a passive receiver or a worker menjadi learner as a whole person (*strength-based and character building*). Dari proses pembelajaran pedagogy menjadi heutagogy. Dari monodiscipline curriculum menjadi multidiscipline-interdiscipline-transdiscipline curriculum.

Untuk mengukur keberhasilan revitalisasi SMK tahun 2020-2024 perlu dilakukan skema pelaksanaan. Dimulai dari perencanaan (*plan*), implementasi (*do*), monitoring (*check*), tindakan (*action*). Perencanaan dilakukan sebagai hasil asesmen sebelumnya. Sekolah melakukan program revitalisasi yang sudah dilakukan. Kemudian dilakukan monitoring oleh direktur atau pihak lain. Kemudian sekolah menindaklanjuti hasil monitoring internal maupun eksternal untuk memperbaiki pelaksanaan revitalisasi”.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan sebesar 30 persen atau sebesar Rp. 35,1 triliun yang dialokasikan dari total APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Dengan komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. *Action Plan* Pendidikan di Provinsi Jawa Timur difasilitasi dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Anggaran pendidikan untuk SMA dan SMK gratis berkualitas (BPOPP).
2. Penguatan revitalisasi SMK.
3. Penguatan SMK pengampu. Sejak tahun 2019 telah difasilitasi setiap SMK pengampu pengampu 5 SMK sekitar sesuai dengan jurusan yang relevan. Saat ini sudah ada 157 SMK pengampu yang mengampu 785 SMK.
4. Meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan SMK.
5. Pengadaan Bantuan Operasional Siswa (BOS) pendidikan SMK.

6. Peningkatan sarana dan prasarana SMK.
7. Meningkatkan prestasi dan peserta didik SMK.
8. Penyelenggaraan DAK pendidikan SMK.
9. Memberikan honorarium bagi 19.643 orang untuk Guru Tidak tetap(GTT) dan PTT di SMA, SMK, dan PK-LK Negeri.
10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) sebagai pengembangan guru. Sudah ada Bosda Madin kepada 1.084.810 ula, 260.224 ustho, dan 87.721 guru/ustadzah.
11. Di lingkup pesantren, Pemprov Jatim membuat 40 SMK mini untuk meningkatkan kualitas SDM.” (Sumber : bappeda.jatimprov.go.id/RPJMD Jawa Timur 2019-2024)

Komunikasi Publik Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari program pembangunan ekonomi secara nasional. Secara keseluruhan prioritas pembangunan nasional mencakup 7 sasaran. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak menetapkan prioritas pembangunan di Jawa Timur 2019-2024 dalam Nawa Bhakti Satya. Sembilan Bhakti tersebut adalah:

1. Bhakti Jatim Sejahtera. Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Bhakti Jatim Kerja. Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi.
3. Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat. Menitikberatkan pada program pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas.
4. Bhakti Jatim Akses. Membangun infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar.
5. Bhakti 5, Jatim Berkah. Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur, dan berintegritas.
6. Bhakti Jatim Agro. Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan.
7. Bhakti Jatim Berdaya. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan mendorong terciptanya desa mandiri.
8. Bhakti Jatim Amanah. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan antikorupsi.

9. Bhakti Jatim Harmoni. Mewujudkan harmoni sosial, alam, dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olahraga.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan implementasi Peta Jalan Revitalisasi SMK, peneliti memberikan kesimpulan bahwa Komunikasi Publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2016, tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur;

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Forum Group Discussion dan Diskusi terpumpun yang terdiri dari instansi/ OPD, Dunia Usaha dan Industri, Perguruan Tinggi sebagai penjamin mutu, serta Lembaga SMK sebagai objek revitalisasi pada kurun waktu 2018 s.d 2020;

Komunikasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) yaitu melalui Inpres dan Pergub dan manajemen komunikasi (*communication management*) yaitu *Top to Down* dari pemangku

kebijakan dalam hal ini Dinas-dinas terkait kepada komunikator yaitu stakeholder terkait (Dunia Usaha Industri, perguruan Tinggi dan SMK) untuk mencapai tujuan yaitu tersusun dan terimplementasikannya Peta Jalan Revitalisasi SMK. Untuk mencapai tujuan tersebut komunikasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara aktif dilakukan, terbukti dari terpetakannya kebutuhan masing-masing sektor kebijakan dalam penyusunan dan implementasi Peta Jalan Revitalisasi SMK.

Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka percepatan revitalisasi SMK, antara lain meliputi:

- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing masing;
- b. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK;
- d. mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing masing;
- e. mendorong dan memberi fasilitas kepada SMK untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi;
- f. mendorong dan memberi fasilitasi serta dukungan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan revitalisasi SMK; dan
- g. mendorong peningkatan kerjasama, peran dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta masyarakat baik dalam proses pendidikan maupun dalam proses penyerapan lulusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar, 1994. **Strategi Komunikasi**. Bandung : PT Armico. Beni, Saebani Ahmad. 2008, **Metode Penelitian**, Bandung : Pustaka Setia. Bernard, 2005. **Komunikasi Suatu Pengantar**, Jakarta : Bumi Aksara. Bungin, Burhan. 2008, **Metode Penelitian Kualitatif**, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cangara, Hafied, 2022. **Perencanaan dan Strategi Komunikasi (Edisi Revisi)**, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arie Purnomo, 2018, **Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintah Indonesia**.
- Dwi Harivarmn, 2016, **Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan**. Veronica Missa, Agung Suprojo, Ignatius Adiwidjaja, 2013, **Peran Komunikasi Organisasi Pada Pemerintahan Desa Landungsari Dalam Menunjang Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat**.
- Devito, Josepo A. 1997, **Komunikasi Antara Manusia**. Jakarta : propesionalbook. Effendy, Onong Uchjana, 2000. **Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi**, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- _, 2006, **Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi**, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- _, 1993, **Dinamika Sosial, Bandung** : RemajaRosdakarya. _, 2006, **Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek**. Bandung : Remaja Rosdakarya. McQuail, Denis, 1987. **Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar**, Jakarta : Erlangga. Morissan, 2020. **Komunikasi Organisasi**, Jakarta : Prenada Media Group. Moleong, Lexy, 1998. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy, 2001. **Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya**, Bandung : Remaja Rosda Karya. _____, 2002. **Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar**, Bandung : Remaja Rosda Karya. Panuju, Redi, 2021. **Komunikasi Organisasi**, Jakarta : Prenamedia Group. _____, 2018. **Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi**, Jakarta : Prenamedia Group. Ruliana, Poppy, 2014. **Komunikasi Organisasi Teori dan Kasus**, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suwatno, 2019. **Komunikasi Organisasi Kontemporer**, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Suranto, 2018. **Komunikasi Organisasi Prinsip Komunikasi untuk Peningkatan Kinerja Organisasi**, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pokja Revitalisasi SMK, 2018. **10 Langkah Revitalisasi SMK**, Jakarta: Direktorat PSMK Kemdikbud.
- Rusdyawan, H. E., Harliantara, H., Yenny, Y., & Maella, N. F. S. (2024). Communicative Managerial and Transformative Think at PT LAZ Coal Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10498–10504.
- Vendi, R., Harliantara, H., Yenny, Y., Maella, N. F. S., Zulaikha, Z., & Farida, F. (2024). Impression Communication Management on Organizational Communication: LAZ Coal Case Study. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10534–10543.

